



**Butuh Kolaborasi untuk Mewujudkan DIY Bebas Kemiskinan Ekstrem di 2025**

**TAJUK**

**G**ubernur DIY, Sri Sultan HB X menargetkan DIY bebas dari kemiskinan ekstrem pada 2025. Pemberantasan kemiskinan ekstrem ini adalah tahapan untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah, yakni *Terwujudnya Panca Mulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi*. Merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2022-2027, terdapat beberapa permasalahan pokok pembangunan yang

dihadapi yaitu kemiskinan, ketimpangan, pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta potensi bencana. Rencana pembangunan tahun 2025 diharapkan mampu menjawab permasalahan tersebut yang keberhasilannya tercermin pada pencapaian indikator-indikator keterwujudan Panca Mulia. Selain kemiskinan, ketimpangan pendapatan juga masih menjadi salah satu permasalahan pokok pembangunan di DIY. Peningkatan aksesibilitas di berbagai sektor, terutama di wilayah selatan, perlu terus dilakukan. Pusat-pusat ekonomi baru berbasis potensi di wilayah selatan perlu dikembangkan secara terpadu dan lintas sektor.

Sultan mengimbau agar para asisten, staf ahli, dan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemda DIY agar berpikir secara kreatif dan mengikuti perkembangan zaman yang mengarah pada industrialisasi. Aparat pemerintah harus membuat kebijakan yang membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Sultan mencontohkan agar tanah kas desa (TKD), Dana Keistimewaan, dan Lumbung Mataraman dimanfaatkan untuk menambah penghasilan masyarakat. Misalnya dengan menanam tanaman yang bernilai secara ekonomi. Tidak hanya menanam sayuran untuk dikonsumsi sendiri. Berdasarkan catatan

Pemda DIY, angka kemiskinan tercatat sebanyak 11,04% atau turun 0,45 dibandingkan dengan September 2023, meski demikian, angka kemiskinan di DIY masih di atas rata-rata nasional yang berada di angka 9,36%. Pemda DIY pada 2024 memastikan ada kebijakan yang menasar 8.000 warga lansia miskin. Mereka akan diberi tabungan pendapatan melalui belanja sembako. Program ini diharapkan akan menurunkan satu digit angka kemiskinan. Sebanyak 8.000 warga lansia di wilayah DIY akan mendapatkan bantuan program pengentasan kemiskinan ekstrem berupa bahan kebutuhan pokok senilai Rp300.000

setiap bulan mulai 2024. Program yang didanai Dana Keistimewaan tersebut kurang lebih menelan anggaran Rp28,8 miliar. Dalam program ini, sasaran terbanyak bantuan tersebut berasal dari Gunungkidul, yakni 3.413 penerima yang tersebar di 18 kapanewon 144 kalurahan, kemudian Sleman sebanyak 2.400 warga lansia; disusul Bantul sebanyak 1.186 warga lansia; Kota Jogja 560 warga lansia; dan Kulonprogo sebanyak 441 penerima. Upaya Pemda DIY yang menargetkan Bumi Mataram bebas kemiskinan ekstrem pada 2025 harus didukung semua pihak. Terlebih, upaya ini membutuhkan kerja keras dan kolaborasi

semua pihak. Pengentasan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun semua lembaga, mulai tingkat provinsi hingga tingkat paling rendah seperti pemerintah kalurahan. Pemerintah juga perlu mendata secara valid, mana saja warga miskin ekstrem yang luput dari pendataan. Berbagai program yang digulirkan juga harus tepat sasaran. Hal ini sangat penting agar masyarakat miskin bisa benar-benar berdaya. Poin berikutnya, program pemberayaan berkelanjutan tetap harus dilakukan terutama untuk warga yang masih produktif agar ada solusi berkelanjutan atas persoalan kemiskinan di DIY.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005